

JEJAK KOLONIALISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: DARI TANTANGAN HINGGA TRANSISI

Ratna Kasni Yuniendel
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
ratnakasni@uinib.ac.id

ABSTRACT

Islamic education in Indonesia has experienced a dynamic development since the pre-colonial period through traditional institutions such as pesantren, surau, and madrasah that functioned as centers of religious and moral education. The arrival of Dutch colonialism changed the course of Islamic education through discriminatory policies aimed at reducing its influence in indigenous society. Colonialism introduced a more controlled Western education system and sidelined Islamic education, which had to adapt amidst the pressure. Despite facing many obstacles, Islamic education played a significant role in awakening the spirit of nationalism and became a means of resistance against colonialism. After independence, Islamic education transitioned into a more inclusive national system, although it still faces the challenge of maintaining Islamic values amid globalization. This research focuses on the traces of colonialism in Islamic education in Indonesia, examining its impact on the structure of education as well as the adaptation process that continues to this day. Through this historical analysis, it is hoped that a deeper understanding of the role of Islamic education in building national identity and the development of relevant educational policies will emerge.

Keywords: Islamic Education, History, Colonialism

ABSTRAK

Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang dinamis sejak masa pra-kolonial melalui lembaga-lembaga tradisional seperti pesantren, surau, dan madrasah yang berfungsi sebagai pusat pendidikan agama dan moral. Kedatangan kolonialisme Belanda mengubah arah pendidikan Islam melalui kebijakan diskriminatif yang bertujuan mengurangi pengaruhnya di masyarakat pribumi. Kolonialisme memperkenalkan sistem pendidikan Barat yang lebih terkendali dan mengesampingkan pendidikan Islam, yang harus beradaptasi di tengah tekanan tersebut. Meskipun menghadapi banyak kendala, pendidikan Islam berperan signifikan dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi sarana perlawanan terhadap penjajahan. Setelah kemerdekaan, pendidikan Islam bertransisi ke dalam sistem nasional yang lebih inklusif, meski masih menghadapi tantangan mempertahankan nilai-nilai keislaman di tengah globalisasi. Penelitian ini berfokus pada jejak kolonialisme dalam pendidikan Islam di Indonesia, menelaah dampaknya terhadap struktur pendidikan serta proses adaptasi yang berlangsung hingga kini. Melalui analisis historis ini, diharapkan muncul pemahaman lebih mendalam tentang peran pendidikan Islam dalam membangun identitas nasional dan pengembangan kebijakan pendidikan yang relevan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Sejarah, Kolonialisme

A. Pendahuluan

Pada masa pra-kolonial, pendidikan Islam di Indonesia berkembang melalui lembaga-lembaga tradisional seperti pesantren, surau, dan madrasah yang berfungsi sebagai pendidikan agama dan budaya. Lembaga-lembaga ini menyediakan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang meliputi pengajaran Al-Qur'an, hadis, fikih, serta ilmu-ilmu alat tata bahasa Arab. Pesantren sebagai, sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara (Usman, 2013), tidak hanya menjadi tempat belajar agama tetapi juga pusat pembentukan moral dan spiritual masyarakat.

Ketika kolonialisme mulai masuk ke Indonesia, pemerintah kolonial Belanda melihat pendidikan Islam sebagai tantangan terhadap upaya mereka mengendalikan masyarakat pribumi. Untuk itu, mereka mulai melakukan intervensi dalam sistem pendidikan Islam dengan tujuan melemahkan pengaruhnya dan mengalihkan perhatian masyarakat ke lembaga pendidikan ala barat yang lebih terkendali.

Selama masa kolonial, pendidikan Islam menghadapi

berbagai tantangan yang signifikan, terutama dari kebijakan diskriminatif yang di terapkan oleh pemerintah kolonial

Menghadapi tekanan dan pembatasan dari pemerintah kolonial, lembaga-lembaga pendidikan Islam merespons dengan berbagai bentuk adaptasi dan perlawanan demi menjaga kelangsungan dan relevansi mereka di tengah masyarakat.

Pendidikan Islam memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme dan menjadi sarana perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya kebebasan dari penjajahan. Melalui pendidikan di pesantren, madrasah, dan organisasi-organisasi Islam, para tokoh pendidikan Islam menyelipkan ajaran tentang cinta tanah air, solidaritas, dan penolakan terhadap penindasan kolonial.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam mengalami transisi signifikan dari masa kolonial ke masa pasca-kolonial, dimana lembaga-lembaga pendidikan Islam mulai mendapat pengakuan dan kebebasan lebih besar. Pada era kemerdekaan,

pemerintah Indonesia berusaha mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, menjadikannya bagian yang diakui secara formal dalam struktur pendidikan.

Memahami jejak kolonialisme dalam pendidikan Islam di Indonesia memiliki signifikansi penting untuk menilai pengaruhnya yang masih terasa hingga saat ini. meskipun Indonesia telah merdeka, dampak dari kebijakan kolonial terhadap struktur dan pendekatan pendidikan Islam masih terlihat dalam berbagai aspek. Melalui analisis sejarah kolonialisme dalam pendidikan Islam, kita dapat memahami bagaimana sistem pendidikan ini harus beradaptasi dengan tantangan eksternal dan kemudian bertransformasi dalam konteks kemerdekaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sjamsuddin (1996:88) mengemukakan bahwa teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan

sejarah. Penelitian historis adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk menelaah dan mendapatkan informasi mengenai masa lampau. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gejala yang terjadi di masa lampau, bukan yang terjadi saat penelitian dilakukan (Rustamana & Dkk, 2024).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Dampak Kebijakan Kolonialisme terhadap Pendidikan Islam

Kebijakan kolonial Belanda memiliki dampak mendalam terhadap struktur dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, mengingat Belanda berusaha melemahkan pengaruh pendidikan Islam yang dianggap dapat mengancam kekuasaan mereka. Pemerintah kolonial menerapkan sejumlah kebijakan yang berfokus pada pembatasan kurikulum, pengawasan ketat terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, dan pendirian sekolah-sekolah kolonial yang berfungsi sebagai pesaing. Kebijakan ini di rancang untuk mengurangi peran pendidikan Islam dalam membentuk identitas dan solidaritas sosial masyarakat Muslim di Indonesia.

1. Pembatasan Kurikulum Pendidikan Islam

Pemerintah kolonial sangat khawatir dengan potensi pendidikan Islam untuk menyebarkan ajaran yang dapat membangkitkan semangat perlawanan terhadap kolonialisme. Salah satu kebijakan utama yang di terapkan adalah pembatasan kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan Islam (Putri, 2023; Rohman, 2018). Materi yang berkaitan dengan sejarah Islam, ajaran jihad, atau topik-topik lain yang dianggap bisa menginspirasi pemikiran anti-kolonial diawasi dengan ketat dan sering kali dilarang. Pesantren dan madrasah yang tidak mematuhi pembatasan ini bisa ditutup atau dibatasi aktivitasnya.

Kebijakan pembatasan kurikulum ini berdampak langsung pada ruang gerak pendidikan Islam, memaksa lembaga-lembaga pendidikan tersebut berfokus pada materi-materi agama dasar dan menghindari diskusi yang dianggap politis dan subversif. Akibatnya, pendidikan Islam kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kurikulum yang menyentuh aspek sosial, politik,

dan sejarah Islam secara mendalam. Hal ini tidak hanya membatasi perkembangan intelektual siswa, tetapi juga membentuk stigma bahwa pendidikan Islam kurang relevan untuk kebutuhan kehidupan modern, terutama dalam konteks lapangan pekerjaan yang semakin berkembang.

2. Pengawasan Ketat terhadap Lembaga Pendidikan Islam

Pada tahun 1925 M. Pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kyai) boleh memberikan pelajaran mengaji. Peraturan itu mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan islam yang sudah tampak tumbuh seperti Muhammadiyah, Partai syarikat Islam, Al-Irsyad dan lain- lain. Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme-Islamisme pada tahun 1982 M, berupa sumpah pemuda (Zuhairini & Dkk, 2000).

Untuk lebih memperkuat kontrol atas pendidikan Islam, pemerintah kolonial memberlakukan pengawasan ketat terhadap kegiatan lembaga-

lembaga pendidikan Islam (Mubin & Aziz, 2020; Titin, 2018). Ordinansi Sekolah Liar (*wilde scholen ordonnantie*) yang di terapkan pada tahun 1932 adalah contoh konkret dari kebijakan ini, di mana lembaga pendidikan non-pemerintah, termasuk pesantren dan madrasah, diwajibkan memperoleh izin dari pemerintah kolonial untuk dapat beroperasi (Lestari, 2022). Kebijakan ini membatasi kebebasan operasional lembaga pendidikan Islam, memaksa mereka untuk menjalankan kurikulum dan metode yang sejalan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pengawasan ini menciptakan tekanan bagi lembaga pendidikan Islam untuk menyesuaikan aktifitasnya dengan keinginan kolonial. Banyak lembaga yang harus mengubah kurikulum, metode pengajaran, bahkan manajemennya agar tetap dapat beroperasi. Selain itu, akses ke bantuan finansial dan sumber daya sangat terbatas bagi lembaga pendidikan Islam, yang semakin memperparah ketertinggalan mereka dari sekolah-sekolah yang disetujui dan didukung oleh pemerintah kolonial. Pengawasan

ketat ini pada akhirnya membatasi independensi pendidikan Islam dan mendorong mereka untuk beroperasi dalam kondisi yang tidak ideal, baik dari segi fasilitas maupun materi pengajaran.

Jika kita melihat peraturan-peraturan pemerintah belanda yang demikian ketat dan keras mengenai pengawasan, tekanan dan pemberantasan aktivitas madrasah dan pondok pesantren di Indonesia, maka seolah-olah dalam tempo yang tidak lama Pendidikan Islam akan menjadi lumpuh atau porak poranda, akan tetapi apa yang dapat disaksikan dalam sejarah adalah keadaan yang sebaliknya. Masyarakat Islam di Indonesia pada zaman itu laksana air hujan atau air rabah yang sulit dibendung. Dibendung disini, meluap disana Jiwa islam tetap terpelihara dengan baik, para ulama dan kyai bersikap non cooperative dengan belanda. Mereka menyingkir dari tempat yang dekat dengan Belanda. Mereka mengharamkan kebudayaan yang dibawa belanda dengan berpegang teguh kepada hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya:" barang siapa yang menyerupai suatu golongan maka

ia termasuk golongan tersebut" (HR. Abu Dawud dan Imam Hibban). Mereka tetap berpegang kepada ayat Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 51. yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu)*".

3. Pengaruh Sekolah Kolonial Sebagai Pesaing Pendidikan Islam

Salah satu strategi utama pemerintah kolonial untuk melemahkan pendidikan Islam adalah dengan mendirikan sekolah-sekolah kolonial yang memiliki daya tarik ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Sekolah-sekolah seperti *Hollandsch inlandsche school (HIS)* dan *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)* didirikan sebagai alternatif bagi masyarakat pribumi yang menginginkan pendidikan yang dianggap lebih bergengsi (Prayudi & Salindri, 2015; Saputra, 2018). Sekolah-sekolah ini mengajarkan pengetahuan umum dengan kurikulum berbasis bahasa Belanda dan menawarkan prospek kerja yang lebih menjanjikan di bawah pemerintah kolonial.

Dengan keberadaan sekolah kolonial ini, pendidikan Islam

mengalami penurunan minat dari masyarakat yang melihat pendidikan Barat sebagai sarana mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih efektif. Lulusan sekolah kolonial biasanya mendapatkan akses ke pekerjaan di sektor pemerintah dan bisnis yang membutuhkan keterampilan berbahasa Belanda serta pengetahuan yang lebih luas di luar konteks keagamaan. Hal ini menyebabkan pendidikan Islam kurang prestisius, karena hanya fokus pada ajaran agama dan tidak memberikan keuntungan praktis dalam dunia kerja. Akibatnya, terjadi perubahan preferensi di kalangan masyarakat Muslim, terutama dari kalangan kelas menengah, yang mulai beralih ke sekolah-sekolah kolonial demi masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak mereka.

Perlawanan dan Adaptasi Lembaga Pendidikan Islam

Pada masa kolonialisme, lembaga pendidikan Islam di Indonesia, seperti pesantren, madrasah, dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), menghadapi tekanan yang signifikan dari pemerintah kolonial (Sabarudin, 2015; Syarif,

2019). Pemerintah kolonial, terutama pada masa penjajahan Belanda, sering melihat lembaga-lembaga ini sebagai potensi ancaman karena peran mereka dalam membangun kesadaran religius dan semangat kebangsaan. Respons lembaga-lembaga ini terhadap tekanan tersebut beragam, mencakup strategi perlawanan dan adaptasi demi menjaga eksistensi serta kontribusi terhadap pembentukan identitas dan solidaritas Nasional.

1. Perlawanan Melalui Identitas dan Solidaritas Nasional

Lembaga pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai wadah membangun kesadaran kolektif dan solidaritas nasional. Pendidikan Islam memberikan ruang untuk memperkuat jati diri umat Muslim Indonesia dengan mengajarkan nilai-nilai agama yang bersanding dengan cita-cita kemerdekaan. Tokoh-tokoh seperti K.H. Hasyim Asy'ari (pendiri NU) dan K.H. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) mengajarkan umat untuk mempertahankan identitas agama dan kebangsaan sebagai bentuk perlawanan kultural

terhadap kolonialisme (Ni'mah, 2014).

Sejak awal abad ke-20, sejumlah organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah didirikan untuk memperkuat peran pendidikan Islam. Tokoh penting seperti K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Ahmad Dahlan berperan besar dalam mendirikan dan mengembangkan kedua organisasi ini. K.H. Hasyim Asy'ari, melalui NU, mengedepankan prinsip-prinsip keislaman yang memotivasi umat untuk menjaga kemandirian dalam beragama sekaligus membentuk kesadaran tentang hak untuk merdeka. Di sisi lain, K.H. Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah menekankan pentingnya pendidikan yang berorientasi pada kemajuan, dengan tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman dan membangun solidaritas nasional.

Kedua tokoh ini mengajarkan bahwa agama bukan hanya tentang ritus dan ibadah, tetapi juga sumber kekuatan untuk membangun perlawanan terhadap penjajahan. Dalam konteks sejarah, misalnya, K.H. Hasyim Asy'ari berperan penting dalam fatwa

“Resolusi Jihad” pada 22 Oktober 1945 (Fadhli & Hidayat, 2018), yang menyerukan umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman pasukan kolonial. Resolusi ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pengajaran keagamaan tidak hanya menyangkut persoalan spiritual, tetapi juga persoalan kebangsaan.

Statistik mengenai lembaga pendidikan Islam pada masa kolonial menunjukkan peningkatan jumlah sekolah madrasah dan pesantren. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada awal abad ke-20, terdapat ribuan pesantren di Jawa yang menjadi pusat pengajaran agama dan kebudayaan. Misalnya, pada tahun 1930, diperkirakan ada sekitar 9.000 pesantren di Jawa dan Madura (Azra, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa pesantren berperan penting sebagai jaringan pendidikan dan sebagai tempat berkumpulnya berbagai kalangan, dari ulama hingga santri, yang kemudian menjadi fondasi utama dalam membangun identitas keislaman dan nasionalisme.

Melalui pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai agama dan

cinta tanah air, lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan turut berkontribusi dalam menguatkan identitas keislaman dan mendorong rasa solidaritas yang mendalam di kalangan umat Muslim di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana "revolusi mental" yang membawa kesadaran akan pentingnya kemerdekaan dan kemandirian dari dominasi kolonial.

2. Adaptasi dalam Kurikulum dan Metode Pengajaran

Untuk bertahan di bawah tekanan kolonial, lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah mulai melakukan adaptasi dalam kurikulum mereka. Pesantren yang awalnya hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama (seperti fiqih, tauhid, dan tafsir), secara bertahap menambahkan pelajaran umum seperti matematika, geografi, dan bahasa asing. Muhammadiyah, misalnya, dikenal sebagai pelopor dalam mengadopsi metode pengajaran modern dan membuka sekolah-sekolah dengan kurikulum yang lebih beragam. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka menyesuaikan diri dengan konteks yang ada, tetapi juga menarik lebih

banyak murid yang ingin mendapatkan pendidikan agama dan umum sekaligus.

Pada masa penjajahan, adaptasi dalam kurikulum dan metode pengajaran menjadi langkah penting yang diambil lembaga pendidikan Islam untuk bertahan di bawah tekanan kolonial. Kurikulum pesantren yang awalnya fokus pada ilmu-ilmu keagamaan seperti fiqih, tauhid, dan tafsir perlahan diperluas dengan memperkenalkan ilmu-ilmu umum. Langkah ini diambil tidak hanya untuk meningkatkan daya tarik lembaga pendidikan Islam bagi masyarakat, tetapi juga untuk memperlengkapi siswa dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan tantangan dunia modern.

Muhammadiyah, didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 (Abdullah, 2017), menjadi salah satu pelopor dalam memperbarui kurikulum pendidikan Islam dengan memasukkan pelajaran umum seperti matematika, geografi, sejarah, dan bahasa asing. Di bawah arahan K.H. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah membuka sekolah-sekolah yang menggabungkan

kurikulum agama dan umum, yang saat itu dianggap sebagai inovasi besar dalam pendidikan Islam di Indonesia. Langkah ini tidak hanya membantu para siswa untuk memahami pengetahuan modern, tetapi juga membentuk pemikiran kritis yang mampu memahami perubahan sosial di sekitarnya.

Perubahan kurikulum ini sebenarnya juga merupakan strategi untuk melindungi identitas dan eksistensi pendidikan Islam dari kebijakan kolonial. Pemerintah kolonial pada awalnya berusaha menekan lembaga-lembaga Islam dengan membatasi izin operasional dan pengawasan ketat terhadap aktivitas pengajaran di pesantren dan madrasah. Namun, dengan mengintegrasikan pendidikan umum, lembaga-lembaga ini berhasil menarik perhatian masyarakat luas, termasuk kalangan yang lebih moderat dan urban yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka di lembaga yang mengajarkan kombinasi ilmu agama dan umum.

Data dari berbagai laporan sejarah pendidikan menunjukkan bahwa pada akhir 1930-an, jumlah lembaga pendidikan Islam yang menerapkan kurikulum umum

meningkat signifikan. Berdasarkan catatan dari Kementerian Agama, jumlah pesantren yang menawarkan pendidikan umum naik hingga 30% dalam dekade tersebut (Azra, 2004). Muhammadiyah juga memperkenalkan metode pengajaran modern, seperti penggunaan buku teks, papan tulis, dan sistem kelas yang lebih terstruktur, sehingga berbeda dengan pola pendidikan tradisional pesantren yang lebih informal. Hal ini membuat sekolah-sekolah Muhammadiyah tampak lebih modern dan setara dengan sekolah-sekolah kolonial pada masa itu.

Penyesuaian kurikulum juga bertujuan agar para lulusan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam dunia kerja dan dapat berkontribusi pada masyarakat dalam skala yang lebih luas. Dengan keterampilan di bidang matematika, bahasa asing, dan ilmu pengetahuan lainnya, lulusan lembaga-lembaga ini menjadi lebih siap untuk terlibat dalam berbagai sektor dan tidak sepenuhnya bergantung pada bidang keagamaan. Ini menjadi upaya sistematis untuk menyeimbangkan

pendidikan yang berbasis agama dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat.

Pendekatan Muhammadiyah dan adaptasi kurikulum di pesantren menunjukkan upaya pendidikan Islam untuk tetap relevan di tengah kebijakan kolonial yang seringkali diskriminatif. Adaptasi ini mencerminkan respon proaktif lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya mempertahankan identitas keagamaannya, tetapi juga memberi ruang bagi perkembangan intelektual yang sesuai dengan zaman. Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa penjajahan berhasil melakukan perlawanan melalui jalur kultural dan akademik, sambil mempersiapkan generasi yang memiliki kesadaran nasional dan keterampilan global.

3. Inovasi Manajemen dan Organisasi

Selain kurikulum, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU melakukan reformasi dalam manajemen pendidikan. Muhammadiyah dikenal karena pendekatannya yang sistematis dalam membangun sekolah-sekolah Islam dengan struktur manajemen modern, yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga

administrasi yang efektif. Organisasi ini menciptakan struktur yang memungkinkan mereka memiliki otonomi, sehingga tetap bisa mempertahankan nilai-nilai Islam meskipun berada dalam kontrol kolonial. NU, meskipun mempertahankan tradisi pesantren yang lebih konservatif, juga membentuk struktur kepemimpinan yang memungkinkan koordinasi lebih baik di antara pesantren di berbagai daerah.

Pada masa kolonial, organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) tidak hanya memperbarui kurikulum pendidikan Islam, tetapi juga melakukan inovasi dalam manajemen dan struktur organisasi lembaga-lembaga pendidikannya. Kedua organisasi ini menyadari bahwa untuk bertahan di bawah pengawasan ketat kolonial, mereka perlu menerapkan sistem manajemen yang lebih efektif dan terstruktur. Reformasi dalam manajemen ini memungkinkan mereka mempertahankan otonomi dan melindungi nilai-nilai Islam dalam situasi yang penuh tantangan.

4. Kontribusi dalam Pembangunan Identitas dan Solidaritas Nasional

Pendidikan Islam berperan penting dalam membangun

identitas bangsa yang religius dan patriotik. Para ulama dan tokoh pendidikan Islam menanamkan rasa cinta tanah air yang diintegrasikan dengan nilai-nilai keislaman. Di pesantren, misalnya, para santri diajarkan tentang pentingnya membela negara sebagai bagian dari kewajiban agama, yang kemudian berkontribusi pada gerakan nasionalisme. Para lulusan pesantren dan madrasah banyak yang kemudian menjadi pemimpin pergerakan nasional, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan dasar moralitas yang kuat.

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional yang religius dan patriotik di kalangan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan madrasah bukan hanya tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga wadah yang menanamkan kesadaran kolektif akan pentingnya cinta tanah air. Di bawah asuhan para ulama dan tokoh pendidikan Islam, generasi muda diajarkan untuk memahami bahwa membela negara dan melawan penindasan

adalah bagian dari kewajiban agama. Pengajaran ini tidak hanya membekali mereka dengan pengetahuan agama, tetapi juga membangun semangat nasionalisme yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Kontribusi pendidikan Islam dalam membangun identitas nasional juga tercermin dari para lulusan pesantren dan madrasah yang kemudian menjadi pemimpin pergerakan nasional. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, dan K.H. Wahid Hasyim adalah contoh dari generasi yang mendapatkan pendidikan Islam di lembaga-lembaga tradisional dan kemudian berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang keislaman mereka memberikan dasar moralitas yang kuat, yang menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan politik dan sosial selama perjuangan kemerdekaan.

Para santri didorong untuk memaknai ajaran Islam tidak hanya dalam konteks ibadah, tetapi juga dalam perjuangan sosial dan politik. Sebagai contoh, K.H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa

Resolusi Jihad pada tahun 1945 yang mewajibkan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Fatwa ini berhasil menggerakkan ribuan santri dan umat Islam untuk berperang di Surabaya, yang menjadi salah satu peristiwa bersejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan Islam telah menjadi pilar utama yang menguatkan solidaritas nasional dan rasa memiliki terhadap bangsa.

Pendidikan Islam juga memainkan peran dalam menyatukan berbagai suku, budaya, dan bahasa yang berbeda di Indonesia. Di pesantren, santri dari berbagai daerah belajar bersama dalam suasana yang egaliter, di mana identitas keislaman menjadi pengikat utama. Hal ini menumbuhkan rasa persaudaraan yang mendalam di antara santri, yang tidak hanya terikat oleh nilai-nilai agama, tetapi juga oleh cita-cita bersama untuk kemerdekaan. Proses pendidikan di pesantren menanamkan rasa solidaritas yang kuat, mengajarkan santri untuk saling mendukung

dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan.

Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa penjajahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi pengetahuan agama, tetapi juga sebagai kekuatan kultural yang membangun identitas nasional yang tangguh. Kontribusinya dalam menciptakan generasi yang beriman, berakhlak, dan berjiwa nasionalis memberikan landasan moral yang penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Melalui lembaga pendidikan Islam, nilai-nilai keislaman yang inklusif dan patriotik ditanamkan, membentuk generasi yang tidak hanya siap menghadapi tantangan zaman, tetapi juga siap membela bangsa dengan nilai-nilai agama yang mereka anut.

Secara keseluruhan, lembaga pendidikan Islam dan tokoh-tokohnya menunjukkan ketahanan luar biasa dalam menghadapi kolonialisme, baik melalui perlawanan budaya maupun adaptasi strategis. Mereka tidak hanya mempertahankan eksistensi pendidikan Islam, tetapi juga menciptakan fondasi kuat bagi

perkembangan identitas dan solidaritas nasional yang berdampak hingga pascakemerdekaan.

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini menekankan bahwa jejak kolonialisme dalam pendidikan Islam di Indonesia memiliki dampak yang panjang dan kompleks terhadap perkembangan sistem pendidikan Islam, yang berlanjut hingga masa kini. Selama masa kolonial, pendidikan Islam menghadapi tekanan yang signifikan, mulai dari pembatasan akses hingga pengawasan ketat terhadap kurikulum, yang bertujuan untuk melemahkan pengaruh Islam di masyarakat. Namun, pendidikan Islam berhasil bertahan dan bahkan beradaptasi dengan situasi kolonial melalui reformasi kurikulum, pendirian organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, serta penanaman semangat nasionalisme.

Pasca kemerdekaan, pendidikan Islam memasuki era baru dengan upaya pemerintah mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Transisi ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pendidikan Islam untuk berkembang tanpa harus kehilangan

identitasnya. Namun, jejak kolonial masih membekas dalam struktur dan pendekatan pendidikan Islam, dan tantangan kontemporer seperti globalisasi dan modernisasi menuntut adaptasi berkelanjutan.

Melalui pemahaman akan warisan kolonial ini, kita dapat mengembangkan strategi dan kebijakan pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap identitas nasional serta relevan bagi masyarakat modern Indonesia. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada kajian historis dan memberikan wawasan penting dalam upaya memperkuat pendidikan Islam yang inklusif, berkarakter, dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2017). K.H. Ahmad Dahlan (Muhammad Darwis). *Jurnal Sosiologi Agama*, 9(1), 22. <https://doi.org/10.14421/jsa.2015.091-02>
- Fadhli, M. R., & Hidayat, B. (2018). Kh. Hasyim Asy'Ari Dan Resolusi Jihad Dalam Usaha Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. *Swarnadwipa*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.24127/sd.v2i1.762>
- Lestari, D. (2022). Respon Sarekat Islam Terhadap Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (1905-1933). *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 1(01), 7–40. <https://doi.org/10.24090/jsij.v1i1.6644>
- Mubin, F., & Aziz, A. (2020). Politik Pendidikan Islam Indonesia : Perlawanan Pesantren. *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1), 123–135. <http://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/view/45%0Ahttp://jurnal.stitalamin.ac.id/index.php/alamin/article/download/45/38>
- Ni'mah, Z. A. (2014). Pemikiran Pendidikan Islam Perspektif KH. Ahmad Dahlan (1869-1923 M) dan KH. Hasyim Asy'ari 1871-1947(M): Study Komparatif dalam Konsep Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. *Tazkiyah Basa'ad*, 2(1), 135–174. <https://doi.org/10.30762/didaktika.v2i1.136>
- Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). Pendidikan Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda Di Surabaya Tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya At 1901-1942). *Publika Budaya*, 1(3), 20–34. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/PB/article/view/1534>
- Putri, A. E. (2023). Perkembangan Pendidikan Islam Masa Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie Dan Pemerintah Kolonial Belanda. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 4345–4352.
- Rohman, M. (2018). Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 02(Kebijakan Pendidikan Islam), 17–18.
- Rustamana, A., & Dkk. (2024). Metode Historis Sebagai Pedoman dalam Penyusunan

Penelitian Sejarah. *Cendekia Pendidikan*, 5(6), 1–10.

Sabarudin, M. (2015). Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan. *Jurnal Tarbiya UIN SGD*, 1(1), 139–174.
http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/141/pdf_7

Saputra, R. A. (2018). Perkembangan Sekolah Hollandsch Inlandsche School di Purworejo Tahun 1915 - 1930. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, 3(6), 701–715.

Syarif, M. (2019). Politik Etis Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Pesantren. *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama & Kebudayaan*, 5(1), 109–131.

Titin, S. S. (2018). Analisis Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Pendidikan Islam. *Nucleic Acids Research*, 1(1), 44–62.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.gde.2016.09.008>
<http://dx.doi.org/10.1007/s00412-015-0543-8>
<http://dx.doi.org/10.1038/nature08473>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2009.01.007>
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jmb.2012.10.008>
<http://dx.doi.org/10.1038/s4159>

Usman, M. I. (2013). Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam (Sejarah Lahir, Sistem Pendidikan, dan Perkembangannya Masa Kini). *Jurnal Al Hikmah*, XIV(1), 101–119.

Zuhairini, & Dkk. (2000). *Sejarah Pendidikan Islam*. PT Bumi Aksara.